

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Internalisasi Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota dengan Tema RKPD Tahun 2019. Internalisasi pembangunan kewilayahan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yang tercermin pada prioritas pembangunannya ke depan. Didalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2019, sehingga aspek tersebut sinergis dengan perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Provinsi Banten.

Prioritas pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kota Tangerang

Isu Strategis

a) Daya Saing Sumberdaya Manusia

- Kemiskinan dan Pengangguran
- Peningkatan Kualitas Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Kesehatan

b) Daya Saing Ekonomi Daerah

- Koperasi dan UKM
- Ekonomi Lokal
- Ketersediaan Energi
- Ketahanan Pangan

c) Daya Saing Pelayanan Publik

- Penataan Ruang yang berkelanjutan
- Penataan banjir
- Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas
- Penanganan system transportasi

d) Daya Saing Infrastruktur Kota

- Pelayanan administrative
- Pelayanan jasa
- Pelayanan regulasi

Program Prioritas

- a) Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
- b) Pelayanan kesehatan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau (Peningkatan akses kesehatan);
- c) Pelayanan sarana dan prasarana (Fasilitas umum) yang layak dan memadai;
- d) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e) Pariwisata dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi, teknologi, serta daya saing masyarakat;
- f) Kondusivitas iklim investasi dan usaha kondusivitas iklim investasi dan usaha;
- g) Ketahanan pangan daerah;
- h) Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (social, ekonomi, lingkungan);
- i) Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta pelayanan yang prima;
- j) Peningkatan ketersediaan energi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019:

- 1) Mengatasi berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pengangguran, peningkatan investasi, kemiskinan, peningkatan daya saing UKM untuk menunjang pariwisata serta peningkatan pertumbuhan ekonomi
- 2) Peningkatan produktivitas yang membuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru tidak hanya dari sektor industri dan jasa serta pariwisata
- 3) Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran

2. Kota Serang

Isu strategis

- a) Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - Kemiskinan dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - Ketahanan Pangan & peningkatan produksi pangan
 - Pengangguran
 - Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b) Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:

- Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan
 - Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan
 - Pengembangan RSUD Kota Serang
 - Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan penanganan banjir/genangan sesaat
 - Peningkatan sarana prasarana permukiman
 - Penanganan sampah
- c) Isu strategis pada aspek Daya Saing Daerah, meliputi :
- Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - Pengembangan Destinasi Wisata
 - Penataan ruang dan lingkungan hidup
 - Otimalisasi pelayanan perijinan
 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Dukungan Pileg serta Pilpres

Prioritas pembangunan

- a) Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan;
 - b) Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan;
 - c) Penanganan kemiskinan, pengangguran;
 - d) Pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
 - f) Ketahanan Pangan, dan peningkatan produksi pangan;
 - g) Pengembangan ekonomi kreatif, UKM dan koperasi;
 - h) Pengembangan Destinasi Wisata;
 - i) Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan banjir;
 - j) Peningkatan sarana/prasarana permukiman;
 - k) Pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan penanganan sampah
3. Kota Cilegon

Isu Strategis

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
- b) Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian
- c) Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial
- d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

- e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Prioritas Pembangunan

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
- b) Peningkatan kualitas daya saing perekonomian
- c) Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan social
- d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan public serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi, dan hukum
- e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2019:

- a) Memantapkan kemandirian perekonomian daerah, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
 - 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui optimalisasi fungsi BLK dan aksesibilitas informasi dan administrasi ketenagakerjaan;
 - 3) Memberdayakan UMK dan koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi;
 - 4) Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan;
 - 6) Meningkatkan konektivitas industri kecil menengah terhadap rantai produksi industri besar;
 - 7) Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar;
 - 8) Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan fasilitasi usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - 9) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
- b) Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari, dengan arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung Negara
 - 2) Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas
 - 3) Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu
 - 4) Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan
 - 5) Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan
 - 6) Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upayaupaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas
- c) Memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan:
- 1) Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar dan menengah pertama
 - 2) Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus
 - 3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan
 - 4) Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya
 - 5) Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga
 - 6) Meningkatkan Jaminan Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan

- 7) Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
 - 8) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
 - 9) Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet
 - 10) Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan
 - 11) Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
 - 12) Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah
 - 13) Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk
 - 14) Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga
 - 15) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak
- d) Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi
 - 2) Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)
 - 3) Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat
 - 4) Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan

- 5) Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir
- e) Memantapkan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan:
- 1) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan
 - 2) Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - 3) Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi
 - 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran
 - 5) Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah
 - 6) Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah
 - 7) Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu
 - 8) Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa
 - 9) Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu
 - 10) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum
 - 11) Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong

pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat

- 12) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum
- 13) Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah
- 14) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 15) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah
- 16) Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran

4. Kota Tangerang Selatan

Isu Strategis

- a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- b) Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas di wilayah
- c) Angka pertumbuhan penduduk
- d) Tingkat pengangguran
- e) Kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Prioritas Pembangunan

- a) Pengurangan kesenjangan wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur
- b) Peningkatan Daya Saing Daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan
- c) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan
- d) Pengurangan kemiskinan melalui jaminan social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- e) Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi

5. Kabupaten Serang

Isu Strategis

- a) Penanggulangan Kemiskinan:

b) Penanggulangan masalah pengangguran:

Program Prioritas

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya serta kesejahteraan social masyarakat;
- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar;
- c) Peningkatan kualitas penataan ruang, permukiman, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- d) Peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian;
- e) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan public yang prima;
- f) Peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2019:

- a) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b) Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar;
- c) Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- d) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
- e) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan desa;
- f) Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Jalan dan Jembatan;
- g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan;
- h) Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Jaringan Irigasi, Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir;
- i) Meningkatkan pelayanan persampahan;
- j) Meningkatkan cakupan akses pelayanan air bersih/air minum, sanitasi, pembangunan Rumah Tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh;

- k) Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang;
- l) Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup;
- m) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi/penanaman modal;
- n) Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja;
- o) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif;
- p) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- q) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata);
- r) Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur;
- s) Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD;
- t) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- u) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Kabupaten Pandeglang

Isu Strategis

- a) Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya pedesaan.
- b) Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
- c) Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian.

Program Prioritas

- a) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur
- b) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- c) Peningkatan persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan, Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Desa Tertinggal
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021:

- a) Meningkatkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, bahagia, dan peduli sesama.
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan;
 - 3) Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu bagi masyarakat miskin melalui kartu Pandeglang Berkah yang mencakup pelayanan berobat gratis, beasiswa, dan tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, serta rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di Sekolah, peduli keluarga binaan, dan penanganan desa tertinggal;
 - 4) Pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
 - 5) Pembinaan dan bantuan sosial kepada PMKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian;
 - 6) Pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan;
 - 7) Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - 8) Penciptaan pasar logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok;

- 9) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan;
- 10) Peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui gerakan konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- 11) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 12) Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq;
- 13) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama;
- 14) Pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- 15) Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan;
- 16) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda;
- 17) Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda;
- 18) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 19) Peningkatan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak-hak anak;
- 20) Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri;
- 21) Peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
- 22) Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan;

23) Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran.

b) Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian

- 1) Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam);
- 2) Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang;
- 3) Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan;
- 4) Mendorong percepatan terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah;
- 5) Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik;
- 6) Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tanjung Lesung;
- 7) Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan;
- 8) Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang;
- 9) Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan *e-governance*;
- 10) Pembangunan wi-fi/hotspot pada setiap kecamatan;
- 11) Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (*call centre / sms centre*);
- 12) Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA;
- 13) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan;
- 14) Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup;
- 15) Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha.

c) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian

- 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar;
- 2) Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani;
- 3) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani;
- 5) Perlindungan tanaman, hewan dan masyarakat veteriner;
- 6) Mendirikan pusat agribisnis;
- 7) Pendirian pusat distribusi agro;
- 8) Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agrobisnis;
- 9) Pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan;
- 10) Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

d) Meningkatkan nilai tambah maritim bisnis

- 1) Peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 2) Peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya;
- 3) Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman;
- 4) Penyediaan lahan industri maritim;
- 5) Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan.

e) Meningkatkan wisata bisnis

- 1) Pengembangan atraksi wisata alam (seperti Tahura), wisata buatan (agrowisata), minat khusus;
- 2) Pengembangan agrowisata;
- 3) Penggalan Potensi Wisata;
- 4) Mendorong modernisasi wisata air;
- 5) Mendorong internasionalisasi/tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung;

- 6) Pendirian pusat pelatihan SDM pariwisata;
 - 7) Mendorong terlaksananya Festival Layar/Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon;
 - 8) Peningkatan sadar wisata masyarakat;
 - 9) Digitalisasi dan Promosi pariwisata;
 - 10) Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata;
 - 11) Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi;
 - 12) Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari;
 - 13) Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.
- f) Memperkuat Sistem Inovasi Daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan
- 1) Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;
 - 2) Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung inovasi;
 - 3) Mendorong budaya inovasi;
 - 4) Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan;
 - 5) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemaajuan sistem inovasi;
 - 6) Penyelarasan iptekin dengan perkembangan global;
 - 7) Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM;
 - 8) Mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM;
 - 9) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi;
 - 10) Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai *centre of excellence* atau *Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing;
 - 11) Penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah;
 - 12) Pelayanan prima administrasi kependudukan;
 - 13) Penyelesaian konflik pertanahan di daerah;
 - 14) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan;

- 15) Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 16) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik;
- 17) Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik;
- 18) Pelayanan perizinan satu pintu;
- 19) Penguatan investasi dan penanaman modal;
- 20) Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan;
- 21) Pemberian stimulan bagi investor;
- 22) Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi;
- 23) Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah;
- 24) Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah;
- 25) Peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah;
- 26) Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

7. Kabupaten Lebak

Isu Strategis

- a) Pemerataan ketersediaan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air Bersih, dan Sanitasi).
- b) Peningkatan Sarana prasarana serta tenaga SDM pada bidang Pendidikan dan kesehatan.
- c) Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Peningkatan kapasitas ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan publik.
- e) Menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- b) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- c) Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2019 berdasarkan Tujuan Pembangunan:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
 - 1) Peningkatan pendidikan usia dini
 - 2) Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar
 - 3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
 - 5) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan
 - 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - 7) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - 8) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB
 - 9) Peningkatan daya saing tenaga kerja
 - 10) Peningkatan penempatan tenaga kerja
 - 11) Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja
 - 12) Peningkatan Kerjasama dengan beberapa daerah lain yang potensial untuk 5 tahun ke depan
 - 13) Pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - 14) Pengembangan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi PMKS serta pemberian santunan orang terlantar
 - 15) Peningkatan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS
 - 16) Peningkatan pembinaan dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
 - 17) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya
 - 18) Promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya lokal

- 19) Penyediaan perpustakaan daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan yang lain
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas.
 - 1) Peningkatan kualitas perencanaan daerah
 - 2) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 3) Penyediaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - 4) Peningkatan Kerjasama Kemitraan antar pemerintah daerah
 - 5) Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah
 - 6) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 7) Peningkatan pengawasan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - 8) Pewujudan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 9) Peningkatan koordinasi dalam menyelesaikan aset-aset
 - 10) Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - 11) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi
 - 12) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian daerah
 - 13) Peningkatan kinerja pemerintahan desa
 - 14) Optimalisasi penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan
- c) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Ramah Lingkungan
 - 1) Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi
 - 2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM
 - 3) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk & pembiayaan bagi Koperasi & UMKM
 - 4) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pasar-pasar Desa dan Tradisional

- 5) Peningkatan pengawasan harga dan alur distribusi Barang dan Jasa
 - 6) Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industry
 - 7) Peningkatan Produksi dan Kualitas Produksi unggulan
 - 8) Peningkatan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pangan
 - 9) Menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 10) Pengembangan hasil produksi perkebunan
 - 11) Pengembangan usaha hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan
 - 12) Mendorong Seni dan Budaya menjadi objek wisata potensial
 - 13) Peningkatan promosi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- d) Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas
- 1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 - 2) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
 - 3) Peningkatan konservasi sumber daya air
 - 4) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan
 - 5) Mengembangkan lingkungan permukiman sehat
 - 6) Mengadakan dan memasang marka, PJU, rambu-rambu dan lampu lalu lintas di lokasi rawan dan belum ada
 - 7) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
- e) Terjaganya kualitas lingkungan
- 1) Pelaksanaan rehabilitasi lahan
 - 2) Merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - 3) Pelaksanaan upaya pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
 - 5) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
 - 6) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
 - 7) Pembentukan relawan bencana diutamakan pada daerah rawan bencana

- 8) Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam kondisi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
- 9) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan

8. Kabupaten Tangerang

Isu Strategis

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan berbasis potensi local
- b) Mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang
- c) Pemenuhan sarana prasarana dasar, perumahan dan permukiman
- d) Optimalisasi sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- e) Tata Kelola Pemerintahan secara berkesinambungan

Prioritas Pembangunan

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan Ketahanan Pangan
- b) Peningkatan kualitas SDM
- c) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- e) Peningkatan Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman
- f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019:

- a) Melanjutkan program unggulan dan prioritas yang perlu pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan serta mendorong program inovatif daerah;
- b) Mendukung dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Propinsi Banten, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa;
- c) Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan permukiman yang berbasis kawasan dengan sinergi berbagai program dan sumber pendanaan;

- d) Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi;
- e) Penguatan usaha skala kecil dan menengah melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan akses terhadap permodalan, sarana produksi, infrastruktur dan teknologi;
- f) Pembangunan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
- g) Peningkatan program penanggulangan kemiskinan melalui perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan, Peningkatan keterpaduan program dan Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Integrasi Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota

